

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teori Desa Wisata**

##### **2.1.1 Pengertian Desa Wisata**

Berdasarkan panduan yang disajikan dalam “Pedoman Desa Wisata” oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2019, desa wisata didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki potensi dan daya tarik wisata yang khas. Pengunjung dapat merasakan pengalaman istimewa terkait dengan kehidupan dan tradisi masyarakat di daerah pedesaan, lengkap dengan semua potensi yang dimilikinya.

##### **2.1.2 Kriteria Desa Wisata**

Kriteria desa wisata sesuai dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mencakup:

- a. Memiliki potensi daya tarik wisata baik berupa keindahan alam, kekayaan budaya, atau kreativitas dalam bentuk buatan/karya kreatif
- b. Memiliki kelompok/komunitas di kalangan masyarakat
- c. Memiliki potensi tenaga kerja (SDM) lokal yang dapat berpartisipasi dalam upaya pengembangan desa wisata
- d. Memiliki organisasi yang terstruktur untuk mengelola desa wisata
- e. Memiliki potensi dan bantuan untuk ketersediaan fasilitas dan infrastruktur dasar yang mendukung kegiatan pariwisata
- f. Memiliki potensi untuk mengembangkan pasar wisata

##### **2.1.3 Klasifikasi Desa Wisata**

Klasifikasi Desa Wisata menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu:

#### A. Desa Wisata Rintisan

Desa wisata dapat dikatakan sebagai desa wisata rintisan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki potensi wisata yang dapat ditingkatkan
- b. Pengembangan infrastruktur wisata kurang memadai
- c. Tidak terdapat dan atau kurang pengunjung yang datang serta berasal dari penduduk sekitar
- d. Kurangnya kesadaran/pemahaman masyarakat terhadap potensi wisata
- e. Perlunya pendampingan dari pihak terkait, baik pemerintah maupun sektor swasta
- f. Pengembangan desa wisata melalui dana desa
- g. Pengelolaan desa wisata tetap dilakukan oleh masyarakat lokal

#### B. Desa Wisata Berkembang

Desa wisata dapat dikatakan sebagai desa wisata berkembang jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mulai dikenal dan dikunjungi oleh masyarakat sekitar dan wisatawan asing
- b. Fasilitas pariwisata telah mengalami perkembangan
- c. Tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas kelompok

#### C. Desa Wisata Maju

Desa wisata dapat dikatakan sebagai desa wisata maju jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata
- b. Telah mendapat pengakuan dan menjadi tujuan untuk berwisata bagi berbagai jenis wisatawan, termasuk wisatawan asing
- c. Infrastruktur dan sarana pariwisata sudah memadai
- d. Masyarakat mampu mengelola bisnis pariwisata melalui pokdarwis atau kelompok kerja setempat
- e. Masyarakat mampu menggunakan dana desa bertujuan untuk meningkatkan desa wisata

f. Manajemen desa wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat dan pendapatan asli desa

#### D. Desa Wisata Mandiri

Desa wisata dapat dikatakan sebagai desa wisata mandiri jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Masyarakat telah melakukan inovasi untuk mengubah potensi produk wisata desa menjadi entitas bisnis yang mandiri
- b. Telah menjadi tempat wisata terkemuka di seluruh dunia dan telah menerapkan prinsip keberlanjutan yang disahkan secara global
- c. Fasilitas telah memenuhi minimal ketentuan/tolak ukur ASEAN
- d. Kolaborasi antara sektor-sektor dalam manajemen desa wisata dan pentahelix telah berjalan lancar
- e. Peran yang signifikan dari dana desa dalam mengembangkan variasi produk pariwisata yang inovatif
- f. Desa telah berhasil memanfaatkan digitalisasi untuk melakukan promosi sendiri, menciptakan materi promosi, dan menjualnya secara mandiri melalui teknologi serta digitalisasi

#### 2.1.4 Instrumen Penilaian Desa Wisata

Instrumen penilaian merupakan perangkat ukur yang dipergunakan untuk menilai program pengembangan desa wisata. Dalam penyusunan instrumen penilaian untuk desa wisata, dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek desa wisata serta menjabarkan kriteria dari setiap aspek yang ada. Penilaian dilakukan dengan rentang nilai 1 – 4. Instrumen penilaian ini menjadi unsur penilaian kondisi desa wisata. Berikut merupakan instrumen penilaian desa wisata berupa kriteria dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.

Tabel 2.1.4 Instrumen Penilaian Desa Wisata menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman

Komponen	Kriteria
<b>Potensi dan Atraksi Desa Wisata</b>	Potensi alam (desa wisata yang menonjolkan keunikan Sumber Daya Alam sebagai faktor daya tarik utama)
	Atraksi dan/atau tradisi budaya (desa wisata yang menekankan keunikan Sumber Daya Budaya sebagai faktor daya tarik utama)
	Potensi sejarah, baik yang bersifat tidak berwujud (non-bendawi) maupun yang bersifat berwujud (bendawi)
	Usaha atau kegiatan ekonomi kreatif, baik berupa kerajinan makanan maupun non-makanan yang berada dalam desa wisata (desa wisata yang menonjolkan keunikan aktivitas ekonomi sebagai faktor daya tarik utama)
	Variasi atraksi dan/atau tradisi yang masih dipertahankan di dalam desa wisata
	Waktu atau rutinitas pelaksanaan atraksi dan/atau tradisi di desa wisata
<b>Kapasitas Manajerial Pengelola Desa Wisata</b>	Struktur kepengurusan dan aktivitas kelompok
	Legalitas struktur organisasi desa wisata
	Administrasi pertemuan pengurus dan transparansi/keterbukaan pada masyarakat
	Finansial kelompok

<b>Peran serta Masyarakat</b>	Kegiatan wisata, keterlibatan masyarakat dan pengaruhnya bagi lingkungan desa wisata
<b>Amenitas</b>	Fasilitas penginapan di desa wisata
	Fasilitas MCK
	Tersedia PLN dan air bersih
	Pusat sekretariat desa wisata
	Perlengkapan pertunjukan mencakup instrumen musik, pakaian khusus, dan perlengkapan panggung.
	Fasilitas penunjang: <i>souvenir shop</i>
<b>Pemasaran dan Promosi</b>	Pemasaran di dalam desa wisata
	Partisipasi dan kesiapan untuk melaksanakan kegiatan promosi
	Perkembangan program/ paket wisata di desa wisata
<b>Kondisi dan Sarana Aksesibilitas</b>	Keterjangkauan/ durasi perjalanan pusat ibukota provinsi/ pusat ibukota kabupaten menuju desa wisata
	Keadaan jalan yang dilalui untuk mencapai desa wisata
	Kenyamanan jalan menuju atau dari desa wisata
	<i>Signage</i> menuju desa wisata

<b>Kunjungan Wisatawan</b>	Kunjungan wisatawan dalam periode waktu tertentu
<b>Kepemilikan Aset di Desa Wisata</b>	Kepemilikan aset/ investasi/ <i>share holder</i> di dalam desa wisata

#### 2.1.4.1 Atraksi Wisata

Atraksi atau daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata (UU No.10 tahun 2009)

#### 2.1.4.2 Manajerial Pengelolaan Desa Wisata

Manajemen pengelolaan desa wisata melibatkan pemahaman konsep manajemen secara lebih teoritis, organisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pengelolaan ekowisata, dan pengembangan desa wisata sebagai tujuan pariwisata. Selain itu, aspek manajemen pengelolaan desa wisata juga menyoroti hambatan dan tantangan, seperti minimnya pengetahuan masyarakat tentang pariwisata, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kekurangan dalam penerapan manajemen pengelolaan yang sesuai.

#### 2.1.4.3 Peran Masyarakat

Dalam Jurnal "Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat," peran masyarakat dapat diinterpretasikan sebagai keseragaman dalam pola berpikir dan bertindak dari masyarakat pedesaan terkait potensi wisata di wilayah mereka. Kemudian, masyarakat secara kolektif mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata, yang merupakan dimensi yang memberikan dampak positif pada mereka dan mencerminkan identitas mereka sebagai entitas sosial dengan

struktur yang khas atau unik.

#### 2.1.4.4 Amenitas

Dalam penelitian yang berjudul "Analisis Komponen Daya Tarik Desa Wisata" yang dilakukan oleh Henita Safitri dan Dadan Kurniansyah, pengertian Amenitas dapat diartikan sebagai segala fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan oleh pengunjung selama berada di suatu destinasi wisata. Fasilitas dapat dijabarkan sebagai tempat-tempat seperti akomodasi, restoran, tempat ibadah, dan agen perjalanan. Sementara itu, infrastruktur yang diperlukan mencakup hal-hal seperti pasokan air bersih, tenaga listrik, sistem pembuangan sampah, akses internet, teknologi telekomunikasi, dan lain sebagainya.

#### 2.1.4.5 Pemasaran dan Promosi

Kotler dan Armstrong (2008:6) menjelaskan bahwa pemasaran ialah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membentuk hubungan yang kokoh dengan mereka, dengan tujuan untuk memperoleh nilai sebagai hasilnya. Sebaliknya, promosi diartikan sebagai metode komunikasi dalam konteks pemasaran.

#### 2.1.4.6 Kondisi dan Sarana Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan, dan hubungannya erat dengan mobilitas. Dalam konteks pariwisata, aksesibilitas wisata merujuk pada berbagai fasilitas yang mempermudah pengunjung dalam mengunjungi destinasi wisata dan bergerak selama perjalanan wisata. Dalam konteks ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan aksesibilitas, yang dapat digunakan atau tidak digunakan oleh masyarakat (Susantoro & Parikesit, 2004).

#### 2.1.4.7 Kunjungan Wisatawan

Pitana dan Diarta (2009) menyatakan bahwa istilah "wisatawan" mengacu

pada individu yang menjadi bagian dari kelompok *traveler* atau *visitor*. Seorang wisatawan biasanya termasuk dalam kategori *traveler* atau *visitor*, tetapi tidak semua individu yang melakukan perjalanan dapat dianggap sebagai wisatawan. Istilah "*traveler*" memiliki makna yang lebih umum, mencakup individu yang memiliki berbagai peran dalam masyarakat dan terlibat dalam aktivitas sehari-hari seperti pergi ke tempat kerja atau sekolah. Namun, tidak semua orang dalam kategori ini dapat dianggap sebagai turis.

#### 2.1.4.8 Kepemilikan Aset di Desa Wisata

Aset - aset desa ini dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa, dan dimiliki secara resmi oleh desa seperti surat bukti kepemilikan untuk tanah kas desa atau status kepemilikan untuk bangunan desa. Aset - aset tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara, termasuk pembelian, sumbangan, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta dukungan dari pihak lain atau pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tanah kas desa merupakan salah satu aset desa di Jawa, walaupun belum semua desa memiliki bukti kepemilikan yang diakui secara resmi, sebagaimana dijelaskan dalam Buku Pengelolaan Aset Desa, Februari 2014.